

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202169440, 25 November 2021

## Pencipta

Nama : **Sigit Kurniawan dan Dr. Hj. Dewi kurniasih, S.IP., M.Si.**  
Alamat : Perumahan Griya Inti Blok C2 No 14 RT 03 RW 10 Desa Babakan  
Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Kabupaten  
Bandung, JAWA BARAT, 40395  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Komputer Indonesia**  
Alamat : Jl. Dipatiukur No. 112-116, Bandung, JAWA BARAT, 40132  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Skripsi)**  
Judul Ciptaan : **Penerapan Good Governance Di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 22 September 2021, di Bandung  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.  
Nomor pencatatan : 000292088

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE***  
**DI DESA BABAKAN PEUTEUY KECAMATAN**  
**CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Dalam menempuh Jenjang S1  
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Sigit Kurniawan

41717007



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK**  
**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**  
**BANDUNG**  
**2021**

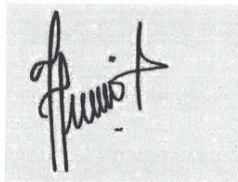
# LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE  
DI DESA BABAKAN PEUTEUY KECAMATAN CICALENGKA  
KABUPATEN BANDUNG

Sigit Kurniawan  
41717007

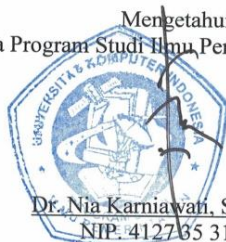
Telah disetujui disahkan di Bandung  
sebagai Skripsi pada: 2 September 2021

Menyetujui.  
Pembimbing



Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si  
NIP. 4127 35 31 003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom



Dr. Nia Karniawan, S.IP., M.Si  
NIP. 412735 31 002

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Master, Doktor) baik di Universitas Komputer Indonesia maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas ditentukan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena, karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Bandung, September 2021



Sigit Kurniawan  
NIM. 41717007

## ABSTRAK

### PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA BABAKAN PEUTEUY KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

Oleh:  
Sigit Kurniawan  
41717007

Skripsi ini dibawah bimbingan:  
Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Governance di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya penerapan *Good Governance* yang dilakukan oleh pihak Aparatur Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang di kemukakan oleh Mardiasmo terdiri atas tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *Good Governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selain itu terdapat satu elemen yang dapat mewujudkan *Good Governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung telah menerapkan 3 pilar yang berkaitan untuk mewujudkan *Good Governance*. Namun penerapan transparansi, partisipasi, akuntabilitas tersebut bisa dikatakan belum dilakukan secara optimal karena kurangnya sosialisasi antara aparat desa dengan masyarakat. Selain itu, ditinjau dari konsep *Value for money* Pemerintah Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sudah sangat maksimal dalam penerapannya terkait sumber daya, finansial, dan pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Penerapan, *Good Governance*, Aparatur Desa.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN BABAKAN PEUTEUY VILLAGE, CICALENGKA DISTRICT, BANDUNG REGENCY**

**By:**  
**Sigit Kurniawan**  
**41717007**

***This thesis is under the guidance of:***  
**Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si**

*This study aims to determine the implementation of Good Governance in Babakan Peuteuy Village, Cicalengka District, Bandung Regency. The problem in this research is that the implementation of Good Governance has not been optimally carried out by the Babakan Peuteuy Village Apparatus, Cicalengka District, Bandung Regency.*

*The theory used in this research is the theory put forward by Mardiasmo which consists of three interrelated pillars to realize good governance such as transparency, participation, and accountability. In addition, there is one element that can realize good governance, namely value for money (economy, efficiency, and effectiveness).*

*The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used are literature studies and field studies such as observation, interviews, and documentation.*

*The results showed that in Babakan Peuteuy Village, Cicalengka District, Bandung Regency, three related pillars had been implemented to realize Good Governance. However, the application of transparency, participation, and accountability can be said to have not been carried out optimally, the lack of socialization between the village apparatus. In addition, in terms of the Value for money concept, the Babakan Peuteuy Village Government, Cicalengka District, Bandung Regency has been very maximal in its application related to resources, finance, and community empowerment.*

*Keywords: Implementation, Good Governance, Village Apparatus.*

## KATA PENGANTAR

*Assallamuallaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat ALLAH SWT karena dengan rahmat dan hidayah-NYA peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Good Governance* Di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung”**. Skripsi ini diperlukan sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sebagai cerminan dan introspeksi bagi peneliti.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, penyusunan, dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Dr. Nia Karniawati, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing skripsi.
4. Dr. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si selaku dosen wali Angkatan 2017.
5. Tatik Rohmawati,S.IP.,M.Si. sebagai Ketua Seminar dan Dr.Tatik Fidowaty,S.IP.,M.Si. sebagai Penelaah.

6. Para Sekretariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yaitu Mba Airinawati di Universitas Komputer Indonesia.
7. Bapak dan Ibu aparatur Kantor Desa Babakan Peuteuy yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan berbagai informasi kepada peneliti.
8. Keluarga tercinta: Ibu dan Bapak. Terima kasih kalian selalu memberikan semangat moril maupun materil kepada peneliti.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

*Wassallamuallaikum Wr. Wb.*

Bandung, September 2021

Peneliti



## DAFTAR ISI

|   | Hal  |
|---|------|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                               | ii   |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                               | iii  |
| ABSTRAK .....   | iv   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                 | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                  | vi   |
| DAFTAR ISI .....                                      | v    |
| DAFTAR TABEL .....                                    | vii  |
| DAFTAR BAGAN .....                                    | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                 | ix   |
| <br>  |      |
| BAB I .....   | 1    |
| PENDAHULUAN .....                                     | 1    |
| 1.1    Latar Belakang Masalah .....                   | 1    |
| Tabel 1.1 .....                                       | 6    |
| Penelitian Terdahulu .....                            | 6    |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                          | 8    |
| 1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian .....             | 9    |
| 1.4    Kegunaan Penelitian .....                      | 9    |
| BAB II .....  | 11   |
| TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....         | 11   |
| 2.1    Tinjauan Pustaka .....                         | 11   |
| 2.1.1    Pengertian Penerapan .....                   | 11   |
| 2.1.2 <i>Good Governance</i> .....                    | 13   |
| 2.1.3    Aspek-aspek <i>Good Governance</i> .....     | 17   |
| 2.1.4    Pilar-pilar <i>Good Governance</i> .....     | 21   |
| 2.1.5    Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> ..... | 23   |
| 2.1    Kerangka Pemikiran .....                       | 26   |

|                      |                 |    |
|----------------------|-----------------|----|
| 2.2                  | Proposisi ..... | 30 |
| BAB V                | .....           | 31 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | .....           | 31 |
| 5.1                  | Kesimpulan..... | 31 |
| 5.2                  | Saran .....     | 32 |
| DAFTAR PUSTAKA       | .....           | 33 |

## DAFTAR TABEL

|                                      | Hal |
|--------------------------------------|-----|
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu ..... | 6   |

## DAFTAR BAGAN

|  | Hal |
|--|-----|
| Bagan 1.1 Model Kerangka Pemikiran ..... | 29  |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|   | Hal |
|---|-----|
| Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PERANGKAT DESA.....                    | 36  |
| Lampiran 2 PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT DESA....                    | 45  |
| Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....                     | 56  |
| Lampiran 4 Surat Telah Selesai Penelitian .....                           | 57  |
| Lampiran 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....                            | 58  |
| Lampiran 6 Dokumentasi dengan Kasi Pemerintahan Desa Babakan Peuteuy .... | 59  |
| Lampiran 7 Dokumentasi dengan Kasi Pemerintahan Babakan Peuteuy .....     | 60  |
| Lampiran 8 DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....                                     | 61  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam suatu Negara adalah setiap Negara giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsep *Good Governance*. *Good Governance* merupakan suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usah. Menurut Bank Dunia yang di kutip Wahab (2002:34). *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaraan salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor dan masyarakat (effendi, 1996 :47).

*Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government*

*Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011 :3).

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

*Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

*Good Governance* sendiri sudah diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Namun, seiring perkembangannya, pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil karena masih memiliki sejumlah kendala terutama dalam pengelolaan anggaran dana dan akuntansi yang keduanya merupakan produk penting dari *Good Governance*. Dalam hal ini di perlukan transparansi informasi yang lebih mendalam terhadap publik, khususnya mengenai APBN sehingga

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan pengawasan terhadap APBN dan BUMN.

“Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.”

(Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000)

Menerapkan *Good Governance* di Indonesia dapat memberikan dampak positif bukan hanya untuk sistem pemerintah namun juga untuk badan usaha non pemerintah lainnya. *Good governance* ini sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. *Good governance* sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa. Advokasi tentang penyelenggaraan atau tata kelola Pemerintahan Desa yang baik sangatlah mendesak untuk dilakukan. Sungguhpun demikian, urgensinya sangat jarang



dikomunikasikan di arena publik. Perhatian terhadap Pemerintahan Desa, walaupun ada, bersifat marginal. Padahal, justru pada level desa inilah interface atau sentuhan negara-rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak terjadi. Ruang publik yang paling dekat untuk diakses masyarakat justru ada dan perlu diperluas pada level desa.

Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat, dimana kondisi ekonomi di Babakan Peuteuy juga bisa menjadi permasalahan *good governance* di Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka. Banyak masalah sosial yang muncul di masyarakat akibat krisis ekonomi yang jika tidak segera diatasi bisa mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Adapun kondisi sosial yang dimana, sebagai salah satu wujud nyata dari berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintahan yang diterapkan yaitu adanya masyarakat yang solid dan secara aktif berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sebuah negara. Masyarakat diharapkan juga melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masyarakat masih tidak berdaya di depan negara dan masih ada banyak sekali contoh konflik sosial dalam masyarakat yang terjadi di Indonesia, seperti konflik antar suku, anarkisme kelompok dan lain sebagainya yang menjadi permasalahan *Good Governance* di Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka.

Penelitian ini menggunakan obyek pemerintahan daerah di Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Hal yang mendorong peneliti melakukan penelitian karena peneliti ingin mengetahui pengetahuan dan pemahaman pegawai tentang pentingnya *Good Governance* yang dipengaruhi oleh

pengendalian intern dan komitmen organisasi. Penelitian yang terkait dengan *Good Governance* memang banyak tetapi penelitian mengenai pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap *Good Governance* khususnya Desa Babakan Peuteuy belum pernah dilakukan karena penelitian yang diangkat lebih banyak mengarah pada pengelolaan keuangan daerah, anggaran daerah, kinerja, budaya organisasi dan *Total Quality Management* serta penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Governance* belum pernah dilakukan.

Tantangan dalam merealisasikan tujuan Penerapan *Good Governance* sangatlah sulit, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang panjang telah tercemar berbagai bentuk praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

*Good governance* adalah bukan tujuan akan tetapi merupakan metode atau cara untuk menjalankan suatu tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu indikatornya sangat variatif dan tidak mutlak, sangat tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan budaya daerahnya masing-masing. Sehingga Penerapan *Good Governance* antara daerah satu dengan yang lain sressing-nya bisa berbeda-beda. Sebenarnya penerapan *Good Governance* dalam Pemerintahan Daerah adalah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi jika ingin daerah tersebut maju dan masyarakatnya sejahtera. Namun demikian sampai sekarang tampaknya masih akan menemui berbagai kendala baik yang bersifat struktural maupun kultural (Said dan Widiyahseno, 2005).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti memilih judul **Penerapan *Good Governance* di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu, peneliti hanya menemukan satu penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>NO</b> | <b>Nama Peneliti</b>         | <b>Judul Penelitian</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>   |
|-----------|------------------------------|---|---|
| 1         | Selamat, Melani D (2020)     | Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) | Penerapan prinsip partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun program-program yang akan ditempuh Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar masih kurang optimal. Dalam hal ini masyarakat masih kurang dilibatkan, akibatnya kebijakan atau program yang ditempuh oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. |
| 2         | Sugiyanto, Eviatiwi K (2019) | Gaya Kepemimpinan Dan <i>Good Governance</i> Sebagai Upaya  | Prinsip <i>Good Governance</i> dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan kepercayaan   |

|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
|   |                     | Peningkatan <i>Excellent Service</i> Dan Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus Dinperindag Jawa Tengah)              | publik, serta gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kepercayaan publik.   |
| 3 | Munaf, Yusri (2020) | Penerapan <i>Good Governance</i> Di Kecamatan Marpyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan) | dimensi akuntabilitas masih ditemukan kelemahan yaitu ketidak pastian waktu pelayanan, masih kurangnya kedisiplinan pegawai, dan masih ditemukan ketidakadilan perlakuan. |

Sumber: hasil kajian peneliti, 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Selamat, Melani D (2020) dengan judul Penerapan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) membahas tentang penerapan prinsip partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun program-program yang akan ditempuh. Perbedaannya adalah peneliti membahas kurangnya perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat, dimana kondisi ekonomi menjadi permasalahan *Good Governance* di Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka. Sedangkan persamaannya adalah teori yang di gunakan yaitu menggunakan teori mardiasmo (2010) tentang Prinsip-prinsip *Good Governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto, Eviatiwi K (2019) dengan judul Penerapan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) membahas tentang Prinsip *Good Governance* dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan kepercayaan publik, serta gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kepercayaan publik. Perbedaannya adalah peneliti tidak hanya

membahas tentang kinerja pelayanan dan gaya kepemimpinan, tetapi membahas seluruh aspek yaitu kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Munaf, Yusri (2020) dengan judul Penerapan *Good Governance* Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan) membahas tentang dimensi akuntabilitas masih ditemukan kelemahan yaitu ketidak pastian waktu pelayanan, masih kurangnya kedisiplinan pegawai, dan masih ditemukan ketidakadilan perlakuan. Sedangkan peneliti membahas tentang peneliti membahas kurangnya perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat, dimana kondisi ekonomi menjadi permasalahan *Good Governance*. teori yang digunakan dengan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang kinerja pelayanan, sosial dan ekonomi masyarakat demi terwujudnya *Good Governance*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Penerapan *Good Governance* di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dilihat dari aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan *Value For Money*?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan *good governance* di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Transparansi Informasi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
2. Untuk menganalisa Partisipasi Masyarakat di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
3. Untuk memaparkan Akuntabilitas Administrasi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
4. Untuk menjelaskan *Value For Money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) Pembangunan yang baik di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada bidang *Good Governance* dan juga diharapkan dapat memberikan ilmu di bidang Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan terhadap Penerapan *Good Governance* Sebagai Upaya Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan mengenai *Good Governance* sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur Penerapan *Good Governance* Sebagai Upaya Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan juga menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya karena masih terbatasnya penelitian. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti yang mengerjakan penelitian yang kemungkinan sama.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan mengenai *Good Governance* agar dapat meningkatkan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Penerapan**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).

Penerapan berkaitan dengan sistem, maka tujuan penerapan lainnya untuk menguji suatu prosedur dalam kebijakan, menguji kemampuan masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang disusun, dan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan itu sendiri. Sistem yang melalui pengujian akan semakin terjamin untuk pengguna di masa depan.



Menurut Setiawan (2004:39), penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Akhirnya implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.

Fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
- d. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

(Loon, 1961:174)

Hukum dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto (1985:2) fungsi dan penerapan hukum adalah:

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- c. Sarana penggerak pembangunan.

(Soekanto, 1985:2)

Untuk menerapkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan sebuah penerapan yang efektif sebagai sarana untuk penggerak pembangunan serta

pembentukan penertiban dan ketentraman masyarakat untuk memfasilitasi serta mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin.

### 2.1.2 *Good Governance*

Setiap kali kita menyaksikan pembicaraan tentang masa depan pembangunan suatu bangsa, kita bertemu dengan kata “*Good Governance*.” *Good Governance* menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terwujudnya *Good Governance* merupakan cita-cita luhur seluruh masyarakat di negeri manapun di dunia.

“Proses reformasi yang terjadi saat ini mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap birokrasi menguat. Birokrasi dituntut untuk menjadi publik servant. Artinya tugas birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang melayani birokrat. Masyarakat menuntut manajemen yang baik dan transparan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Strategi yang dilakukan untuk mengatasi beberapa persoalan birokrasi tersebut adalah melalui reformasi birokrasi.”  
(Kurniasih, D., Amin, M. A. S., & Karniawati, N. 2017)

Bersamaan dengan reformasi dari sistem politik ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula pemikiran tentang “*Good Governance*” atau pemerintahan (pengurusan pemerintah) yang baik. Tetapi pengertiannya masih simpang siur, pada umumnya *Good Governance* berarti pemerintahan yang bersih, atau clean government. Seringkali juga mengarah pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ada juga beberapa pengertian lainnya, diantaranya :

”*Governance* (keperintahan) yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara, tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani (*civil society*).” (Rewansyah, 2010:80)

*Governance* tidak sama dengan konsep *government*. Sebab konsep *government* merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi, yaitu negara dan pemerintah. Sementara *governance* lebih inklusif karena melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah.

*Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

“*Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.” (*World Bank* dalam Mustafa, 2013:187)

*Good Governance* memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai.

“*Good governance is defined as a process as well as a structure that guide the political and socio economic relationships and it refers to several characteristics or indicators such as: participation, rule of law, transparency, responsiveness and accountability. Citizens' perspective of good governance is the improvement of the structure of public service and administration.*” (Elahi dalam Momna Yousaf, 2015:39)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa *Good Governance* didefinisikan sebagai proses serta struktur yang membimbing politik dan hubungan sosial

ekonomi dan mengacu pada beberapa karakteristik atau indikator seperti: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif dan akuntabilitas. Perspektif warga negara dari *Good Governance* adalah perbaikan struktur pelayanan publik dan administrasi.

“*Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.” (Azlina dan Amelia, 2014:32)

Istilah *Governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *Public Governance*, *Private Governance*, *Corporate Governance*, dan *Banking Governanace*. Secara sederhana, *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yg baik. Baik yang dimaksud adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Dari segi fungsional, aspek *Governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertitik tolak dari prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat
  2. Tegaknya supremasi hukum
  3. Transparansi
  4. Kepedulian pada stakeholder
  5. Berorientasi pada consensus
  6. Kesetaraan
  7. Efektivitas dan efisienai
  8. Akuntabilitas
  9. Visi strategis.
- (Mustafa, 2013:187)

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

1. Partisipasi Masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukumhukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi, tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder, lembaga- lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
6. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan
7. Efektifitas dan Efisiensi, proses -proses pemerintahan dan lembaga - lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga- lembaga yang berkepentingan.

Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

(Deddy Mulyadi dalam Surya Dailiati, dkk. 2017:1)

Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*.

“*Good Governance* adalah menyelenggarakan pemerintahan segara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.” (Lembaga Administrasi Negara dalam Sari dan Tamrin, 2017:9)

Untuk menjaga kesinergian di dalam interaksi yang konstruktif diantara domain domain negara sektor swasta dan masyarakat diperlukan penerapan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab untuk membangun efektifitas dan efesiensi dengan menerapkan *Good Governance*.

### **2.1.3 Aspek-aspek *Good Governance***

Berdasarkan pengertian *Good Governance* oleh Bank Dunia dalam Mardiasmo (2002:23) yang sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka menuntut penggunaan konsep *Good Governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya.

Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tangkilisan adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *Agent of Change*.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *Good Governance* awalnya digunakan dalam dunia usaha *corporate* dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam *Governance Corporate* adalah transparansi, akuntabilitas, *fairness*, tanggungjawab, dan responsivitas.

Prinsip-prinsip *Good Governance* bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang individu atau warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penerapan Hukum *Fairness*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia. Sebagai *stakeholder* dalam penerapan hukum, masyarakat selalu dituntut partisipasi aktifnya dalam menghidupkan cahaya hukum, agar hukum tetap memberikan pencerahan dalam realita kehidupan masyarakat dan memberikan arah bagi perjalanan peradaban bangsa. Masyarakat yang sehat dituntut untuk selalu menyediakan bahan bakar keadilan yaitu kejujuran dan keberanian agar perjalanan masyarakat dan negara tidak menyimpang dari tujuan bersama. Dalam pemahaman terhadap *Good Governance* maka aparat hukum tidak mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan hukum tersebut, peran serta masyarakat mutlak diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam keterpurukan akibat pesatnya arus globalisasi.

3. Transparansi (*Transparancey*)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas adalah daya tanggap birokrasi pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga tidak terdapat keluhan dari masyarakat pengguna jasa. Responsivitas juga menunjuk pada keselarasan antar program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

5. Orientasi Consensus (*Oreintation*)

Setiap karyawan yang tergabung dalam suatu organisasi memiliki orientasi kerja masing-masing dan kemungkinan besar karyawan satu dengan lainnya mempunyai orientasi kerja yang berbeda pula, dan apabila orientasi yang dipersepsikannya ini dapat tercapai maka karyawan akan merasakan kepuasan kerja dan bekerja dengan maksimal. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Keadilan (*Equity*)

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan



bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan.

7. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak. Dalam artian setiap organisasi dan lembaga-lembaga harus memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat luas dengan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang sudah diterapkan.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pengambil keputusan atau *decision maker* dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik stakeholders. Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung kepada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja mereka secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

9. Strategi visi (*Strategic vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki Stakeholders. Penerapan *Good Governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah kesembilan dari *Good Governance* adalah membangun the professional government, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

(Mardiasmo, 2002:23)

Untuk mewujudkan prinsip *Good Governance* bagi suatu organisasi publik ataupun dalam skala negara terdapat 9 indikator untuk mewujudkan sebuah *Good Governance* pada pemerintahan agar mewujudkan hubungan sinergis konstruktif di sebuah organisasi diantaranya partisipasi, hukum pairness, transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan strategi visi.

#### **2.1.4 Pilar-pilar *Good Governance***

Menurut Mardiasmo (2009:18) dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

##### **1. Transparansi**

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitor oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni:

- a. adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan,
- b. adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah,
- c. berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Ada beberapa indikator dari transparansi yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

2. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Ada beberapa indikator dari partisipasi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka.
- b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Ada beberapa indikator dari akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- b. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.

4. Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas (*Value for money*)

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ada beberapa indikator dari value for money yaitu sebagai berikut:

- a. Meminimalkan input dan memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal).
- b. Rasio antara output dan input.
- c. Keberhasilan organisasi (tujuan tercapai dan program/kegiatan telah dilakukan dengan benar).

(Mardiasmo, 2009:18)

Ada 3 indikator yang saling berkaitan untuk mewujudkan *Good Governance* yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas serta terdapat 1 elemen yang dapat

mewujudkan *Good Governance* yaitu *Value For Money* (Ekonomi, Efisiensi dan Efektifitas)

### 2.1.5 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Bappenas (2003) ada empat belas nilai yang menjadi prinsip *good governance* yaitu :

1. *Wawasan ke depan (Visionary)*  
Semua kegiatan pemerintah berupa pelayanan publik dan pembangunan diberbagai bidang harus didasarkan visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan rencana strategis sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintah di masa mendatang. rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis kementerian/lembaga/satuan Kerja perangkat daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintah berjalan tanpa arah yang jelas.
2. *Transparansi (Transparency)*  
Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, Lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh semua pihak. Upaya pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan contoh wujud nyata prinsip transparansi.
3. *Partisipasi masyarakat (Participation)*  
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan didalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Partisipasi secara mneyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif.
4. *Akuntabilitas (Accountability)*  
Akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Para

pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat yang bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang berkepentingan dimana bentuk pertanggung jawabannya akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

5. Supermasi Hukum (*Rule of law*)  
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan Lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.
6. Demokrasi (*Democracy*)  
Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dimana rakyat dapat secara aktif menyuarakan aspirasinya. Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh Lembaga eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada consensus sehingga kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan hasil keputusan bersama.
7. Profesionalisme dan kompetensi (*Professionalism and Competency*)  
Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu sehingga dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat dengan memperlihatkan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi. Tingkat kemampuan dan profesionalisme apratur pemerintahan yang ada perlu di evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya mausia melalui Pendidikan, pelatihan, lokarya, dll.
8. Daya Tanggap (*Responsiveness*)  
Setiap masyarakat akan menghadap berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi dan aparatur pemerintahan harus cepat tanggap dalam mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan atau kebijakan, kegiatan, proyek atau program, seperti dengan menyediakan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website dan bentuk lainnya.
9. Efisien dan efektif (*Efficiency and Effectiveness*)  
Pemerintahan harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dalam rangka meningkatkan kinerja dan menghasilkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10. Desentralisasi (*Decentralization*)  
Wujud desentralisasi dengan melakukan pendelegasian urusan pemerintah disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat

yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas serta dapat mendayagunakan sumber daya Lembaga dan aparat pada tingkat yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga daya yang ada dapat digunakan secara proporsional.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*)

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan pembentukan kemitraan dan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sector swasta. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang riil (*demand driven*) seperti dengan pembentukan pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tersebut akan menunjukkan adanya kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan antara pusat dan daerah yang dapat memicu konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

13. Komitmen pada Lingkungan hidup (*Commitment to Environmental Protection*)

Lingkungan hidup memiliki daya dukung yang besar terhadap berlangsungnya pemerintahan, namun dewasa ini kelestarian lingkungan hidup semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Pemerintahan harus mengambil langkah dengan melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara proposional sehingga tidak membebani anggaran belanja dan tidak merusak pasar serta dapat meningkatkan daya saing perekonomian yang komperatif.

(Bappenas, 2003)

Terdapat 14 nilai yang menjadi prinsip untuk mewujudkan *Good Governance* dengan memperhatikan terhadap referensi publik agar mencapai standar efektifitas diantaranya, *visionary, transparensi, patispasion, akuntability, ruleoflaw, democrayi, professionalism and competency, responsiveness, efesiensi and*

*efektifvenes, desentralisasi, private and civil society partnership comitment to reduce inequality, comitment to environmental protection, comitment to fair market.*

## **2.1 Kerangka Pemikiran**

Penerapan *Good Governance* di Desa Babakan Peuteuy dapat dikatakan baik apabila memiliki beberapa prinsip sebagai tolak ukur. Menurut Mardiasmo (2009:18) terdapat prinsip- prinsip utama *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan *Value For Money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) di dalam pemerintahan. Transparansi dengan akuntabilitas saling berhubungan dikarenakan tidak akan tercipta akuntabilitas tanpa adanya transparansi/keterbukaan. Dengan adanya empat prinsip utama *Good Governance* yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Babakan Peuteuy.

### **1. Transparansi**

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah Desa babakan Peuteuy dilihat dari tiga aspek, yakni:

- a. adanya kebijakan Pemerintah Desa Babakan Peuteuy yang terbuka terhadap pengawasan,
- b. adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan Pemerintah Desa Babakan Peuteuy.
- c. berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga Pemerintah Desa Babakan Peuteuy dan BPD.

## 2. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Ada beberapa indikator dari partisipasi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat di Desa Babakan Peuteuy yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka.
- b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan Pemerintah Desa Babakan Peuteuy.

## 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Ada beberapa indikator dari akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Babakan Peuteuy tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.



- b. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku Pemerintah Desa Babakan Peuteuy.

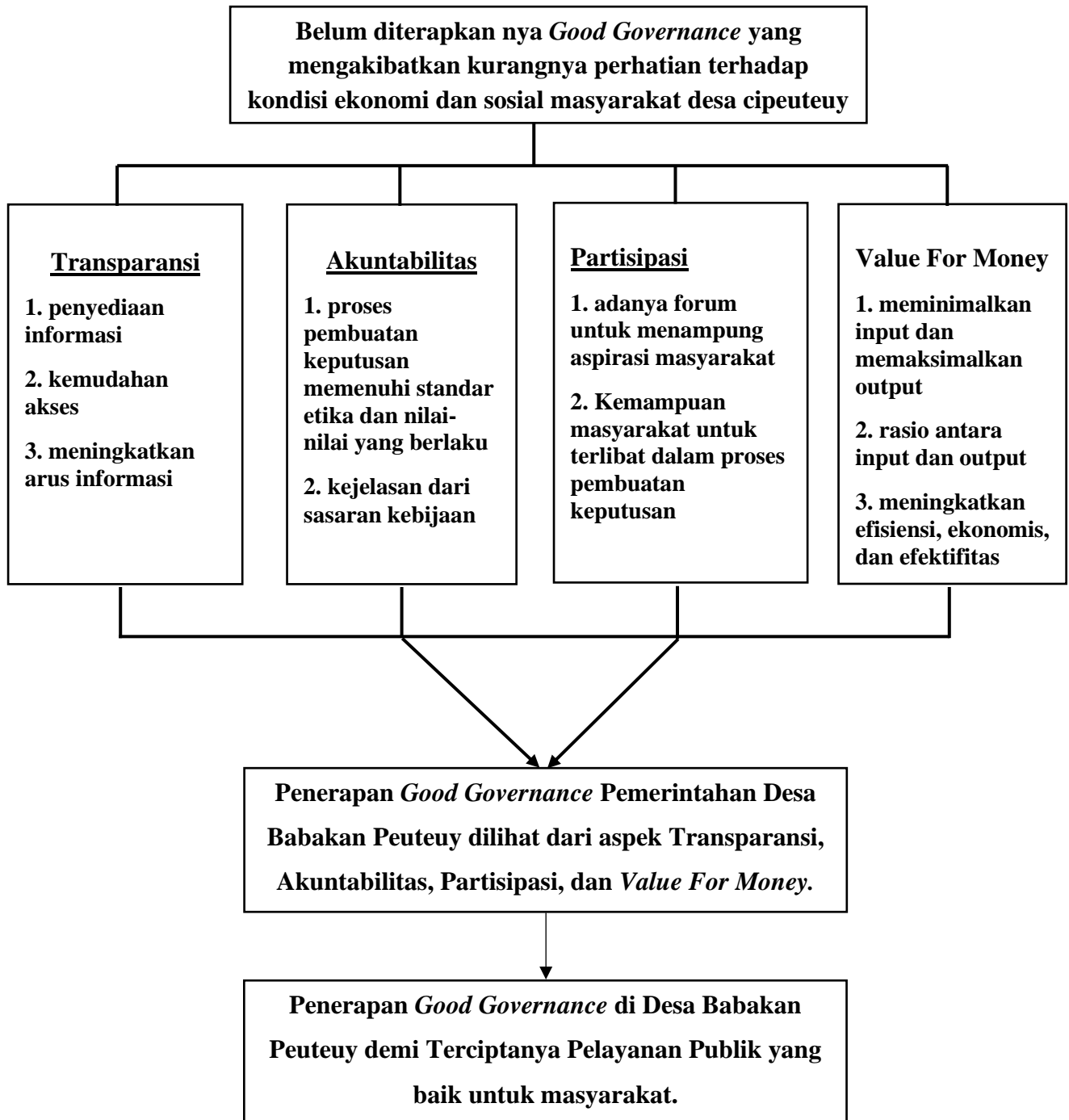
4. Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas (*Value for money*).

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Ada beberapa indikator dari *value for money* yaitu sebagai berikut:

- a. Meminimalkan *input* dan memaksimalkan *output* (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal). Yang ada di Pemerintah Desa Babakan Peuteuy.
- b. Rasio antara *output* dan *input* di. Pemerintah Desa Babakan Peuteuy
- c. Keberhasilan organisasi Desa Babakan Peuteuy (tujuan tercapai dan program/kegiatan telah dilakukan dengan benar).

Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan model kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Bagan 1.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**



## **2.2 Proposisi**

Penerapan *Good Governance* Di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung akan berhasil apabila tata kelola pemerintah berjalan dengan baik dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan *Value For Money*.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Good Governance* di Desa Babakan Peuteuy adalah :

1. Tanpa adanya transparansi, maka partisipasi tidak dapat berjalan begitu pun sebaliknya. Hal tersebut harus didukung pula oleh komitmen antara Pemerintah Desa Babakan Peuteuy dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Sehingga transparansi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik.
2. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan bagaimana sikap masyarakat setempat. Dengan adanya ruang publik yang disediakan untuk masyarakat ini akan menjadikan masyarakat lebih mempercayai program atau informasi yang diberikan aparatur Desa Babakan Peuteuy.
3. Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban tugas Pemerintah Desa Babakan Peuteuy dilaksanakan dengan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Babakan Peuteuy kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib

mempertanggungjawabkan kegiatannya. Pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari kontak sosial yang dibuatnya dengan masyarakat Desa Babakan Peuteuy.

4. Konsep *value for money* di Desa Babakan Peuteuy dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, dan dapat meningkatkan mutu pelayanan serta dapat terwujud seiring dengan perkembangan *value for money* itu sendiri, dan begitupun sebaliknya apabila *value for money* tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik pun tidak akan maksimal.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan peneliti, yaitu:

1. Peranan *Good Governance* harus membangun keterbukaan antara Pemerintah Desa dan masyarakat umum.
2. Edukasi rakyat agar mengetahui secara jelas tentang Peranan *Good Governanance* di Pemerintah Desa Babakan Peuteuy
3. Tingkatkan kompetensi perangkat desa.
4. Desainlah pola partisipasi masyarakat desa agar lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku:

- Azlim, D., & Bakar, U. A. (2012). *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Akutansi* ISSN, 2302, 164.
- Azlina, N., & Amelia, I. (2014). *Pengaruh Good Governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan*. *Jurnal akuntansi universitas jember*, 12(2).
- Cahyadi, A. (2016). *PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya*. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(02).
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.
- Elahi, K. Q. I. (2009). *UNDP on good governance*. *International Journal of Social Economics*.
- Haris, O. K. (2015). *Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan*. *Yuridika*, 30(1), 58-83.
- Heriyanto, A. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Heryana, T., & Dewi, S. K. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur*.”.
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). *Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges*. In *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*.
- Mustafa, M. (2017). *Democratic decentralisation and good governance: the political economy of procurement reform in decentralised Indonesia (Doctoral dissertation)*.

- Putra, H. S. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119.
- Rasul, S. (2009). *Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Rewansyah, A. (2010). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. *Yusaintanas Prima*.
- Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Edy Sujana, S. E. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Soekanto, S. (1977). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-470.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). *Analisis Penerapan GOOD GOVERNANCE dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah*. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 49-59.
- Siringoringo, W. (2015). *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi)*. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207-224.
- Tomuka, S. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*. *Jurnal Politico*, 2(2).
- Usman, U., Sunandar, S., & Farida, I. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah*. *Journal of Accounting and Investment*, 15(2), 101-113.
- Zeyn, E. (2014). *Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan*. *Trikonomika Journal*, 10(1), 52-62.

### **Jurnal – Jurnal:**

Setyadihaja, R., Kurniasih, D., Nursnaeny, P. S., & Nengsih, N. S. (2017). *Good governance vs. sound governance: A comparative theoretical analysis. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*. In *Proceedings of the International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017), Paris, France: Atlantis press.*

Kurniasih, D., Amin, M. A. S., & Karniawati, N. (2017). *Penyusunan roadmap reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance di Kota Bandung. Jurnal Transformative*, 3(1), 66-84.

### **Dokumen – Dokumen:**

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 *tentang Good Governance*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) *Tentang Pelayanan Publik*

### **Rujukan Elektronik :**

(<https://www.usaid.gov>)

(<https://www.praxisframework.org/id/knowledge/governance>)

(<https://egovernmentindonesia.wordpress.com>)

(<https://www.bsn.go.id>)

(<https://www.bappenas.go.id>)



## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PERANGKAT DESA**

Perihal : Permohonan Melakukan Wawancara  
Lampiran : Satu berkas  
Judul Skripsi : Penerapan *Good Governance* Di Desa Babakan Peuteuy  
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Kepada Yth:  
Kepala Desa Babakan Peuteuy  
Kabupaten Bandung

Dengan hormat,

Dalam rangka penelitian skripsi di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, maka saya memohon dengan sangat kepada Bapak/Ibu Kepala dan Bagian Yang Berwenang Kantor Desa Babakan Peuteuy untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Pedoman wawancara ini bukan tes psikologi dari atasan atau dari manapun, maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya semua jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu adalah benar dan jawaban yang diminta adalah sesuai dengan kondisi yang dirasakan Bapak/Ibu selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya saya mengucapkan terima kasih.

Bandung, 31 Agustus 2021

Hormat saya,

Sigit Kurniawan

Identitas Informan:

Nama : Rifan Setiawan  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Jabatan : Kasi Pemerintahan  
Tanggal Wawancara : 28 Agustus  
Usia : 38 Tahun  
Pendidikan : SMA

|              | No | Pertanyaan   | Jawaban   |
|--------------|----|--|---|
| Transparansi | 1  | Bagaimana penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab? | Penyampaian pemerintah desa kepada masyarakat terkait informasi tentang prosedur kegiatan maupun anggaran biaya semua di publikasikan melalui spanduk <sup>2</sup> yang terpampang di Billboard desa Babakan Peuteuy.semua anggaran desa dijelas secara transparan kepada masyarakat. |
|              | 2  | Bagaimana kemudahan akses informasi yang diberikan kepada masyarakat?                                | Untuk akses informasi masyarakat bisa membuka web resmi desa Babakan Peuteuy dan simple desa melalui Sosial media, Sedangkan masyarakat yang awam terhadap teknologi bisa bertanya kepada RT RW,kepala dusun maupun BPD keterwilayahan nya masing-masing.                             |

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
|             | 3 | Bagaimana menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap?                | Kesulitan dalam menyusun mekanisme pengaduan adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya pengaduan peraturan yang dilanggar.   |
|             | 4 | Bagaimana cara meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah?        | Arus informasi yang diberikan pemdes kepada masyarakat melalui media massa dan lembaga non pemerintah dengan memberikan LPJ baik secara tertulis maupun secara langsung ke lapangan.   |
|             |   |  |  |
| Partisipasi | 1 | Bagaimanakah forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka? | Forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas dan bersifat terbuka dilaksanakan setiap tahun melalui MUSREMBANGDES yang di naungi oleh BPD serta dilakukan dimulai dari tingkat RT, RW, KADUS dan Desa. |
|             | 2 | Bagaimana kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan?                                    | Masyarakat bebas mengemukakan ataupun menyalurkan aspirasinya. Respon pemdes ketika masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan sangat mengapresiasi sebab pemdes   |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
|               |   |  | adalah penyelenggara pelayanan masyarakat selama keputusan yang diambil dalam batas kewajaran dalam membangun desa Babakan Peuteuy.   |
|               |   |  |   |
| Akuntabilitas | 1 | Bagaimana proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar? | Dalam hal ini Masyarakat telah diwakili oleh BPD sebagai penanggung jawab dan pengawas dalam segala aspek administrasi yang dilaksanakan secara periodik.   |
|               | 2 | Bagaimana kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku?   | Sampai saat ini pemdes selalu memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan informasi sesuai dengan visi misi desa Babakan Peuteuy.<br>"Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa Babakan Peuteuy yang baik dan bersih, berdaya saing melalui digital yang beretika guna mewujudkan kehidupan desa Babakan Peuteuy yang adil makmur dan sejahtera serta menjunjung |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  | tinggi nilai-nilai agama dan berakhlak mulia".  |
|  |   |  |   |
| Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas ( <i>Value For Money</i> ) | 1 | Bagaimana cara meminimalkan input dan memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal)? | Pemdes Babakan Peuteuy berupaya memaksimalkan sumber daya finansial dengan mengembangkan BUMDes sebagai lembaga di pemerintahan Desa Babakan Peuteuy. |
|  | 2 | Jelaskan bagaimana rasio antara output dan input?  | Keberhasilan pemerintahan Desa Babakan Peuteuy, yaitu kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing.                    |
|  | 3 | Bagaimanakah keberhasilan organisasi (tujuan tercapai dan program/kegiatan telah dilakukan dengan benar)?      | Karang taruna, PKK dan Pos Yandu saling bersinergi dalam perkembangan dan pelayanan Desa Babakan Peuteuy.   |

Identitas Informan:

Nama : Andriyani  
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan  
Jabatan : Kasi Pelayanan  
Tanggal Wawancara : 28 Agustus  
Usia : 32 Tahun  
Pendidikan : SMA

|              | No | Pertanyaan   | Jawaban  |
|--------------|----|--|--|
| Transparansi | 1  | Bagaimana penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab? | Kalo misalkan masalah anggaran biaya atau informasi mengenai prosedur itu dari pihak desa kita membikin spanduk yang besar yang di tempel depan kantor desa dan juga di mading yang tertera di desa. Agar masyarakat mengetahui juga informasi yang terbaru dari pihak desa jadi untuk memonitoring masalah anggaran dan biaya itu ditempel lewat spanduk. |
|              | 2  | Bagaimana kemudahan akses informasi yang diberikan kepada masyarakat?                                | Akses informasi sekarang sudah dipermudah dari dinas kependudukan sekrang udah canggih bisa melalui sosial media, whatssap, dan melalui web online. Bahkan untuk kependudukan sekarang bisa di download melalui playstore  |

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
|             |   |  | yaitu wolokasi sakdav itu untuk kependudukan.<br>Sekarang informasi semua dipermudah agar masyarakat tidak ketinggalan informasi.  |
|             | 3 | Bagaimana menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap?                | Itu udah ada undang undang yang berlaku mengenai peraturan pengaduan masyarakat. Pasal 42 tahun 2018 tentang pengaduan masyarakat.   |
|             | 4 | Bagaimana cara meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah?        | Pertama di desa babakan peuteuy itu ada Kadus atau bisa dibilang kepala dusun nah mereka yang membawahi antara 2 sampai 3 RW nah dari KADUS tersebut di sampaikan kepada RW kemudian dari RW ke RT nah dari RT baru disampaikan kepada masyarakatnya masing-masing. Nah begitulah struktur penyampain informasi yang lebih spesifik. |
|             |   |  |  |
| Partisipasi | 1 | Bagaimanakah forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka? | Tentu saja, sudah jelas terarah dan terbuka juga nah kalo misalkan ada keluhan komplain dari masyarakat itu bisa melalui RT/RW setempat dan bisa juga disampaikan langsung kepada kadus nah nanti dari kadus   |

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
|               |   |  | diproses kepada pemdes atau pemerintahan desa.   |
|               | 2 | Bagaimana kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan?  | Terkait keputusan atau kebijakan yang akan ditetapkan itu melalui tokoh-tokoh masyarakat atau perwakilan dari RW masing masing.<br>Jadi masyarakat mengetahui informasi itu melalui rw kemudian dari RW dimusyawarhkan kepada RT nah dari RT kemudian disampaikan kepada masyarakat. |
|               |   |  |  |
| Akuntabilitas | 1 | Bagaimana proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar? | Tentu saja dengan administrasi yang benar. Segala keputusan apapun itu di rapatkan di desa nah lalu akan ada perwakilan ditiap lembaga lembaga yaitu RW untuk diputuskan apakah layak disetujui atau tidak.  |
|               | 2 | Bagaimana kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi  | Untuk selama ini udah dilaksanakan dan masyarakat juga sudah tau seperti pembangunan perbaikan jalan, insfratraktur, dll.  |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   | organisasi serta standar yang berlaku?   |   |
| Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas ( <i>Value For Money</i> ) | 1 | Bagaimana cara meminimalkan input dan memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal)? | Untuk saat ini kami selaku pengurus desa sudah sangat maksimal terkait sumber daya dan finansial.   |
|  | 2 | Jelaskan bagaimana rasio antara output dan input?  | Sekarang sudah ada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) nah dari situ kami memberdayakan masyarakat BAPAS (Balai Pemasyarakatan) simpan pinjam, nah dari situ cukup membantu membangun perekonomian di desa.   |
|  | 3 | Bagaimanakah keberhasilan organisasi (tujuan tercapai dan program/kegiatan telah dilakukan dengan benar)?      | Untuk selama ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat lebih ke partner kerja bukan organisasi seperti karang taruna, tim relawan selama ini mereka kerjanya cepat tanggap ketika ada bencana mereka langsung turun kelapangan untuk membantu. |

## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT DESA

Identitas Informan:

Nama : Yunita Amelia  
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan  
Jabatan : Masyarakat Desa Babakan Peuteuy  
Tanggal Wawancara : 29 Agustus 2021  
Usia : 43 Tahun  
Pendidikan : SMA

|              | No | Pertanyaan  | Jawaban   |
|--------------|----|---|---|
| Transparansi | 1  | Bagaimana penyampaian aparatur desa kepada masyarakat terkait informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab? | Saat ini desa Babakan Peuteuy mungkin lumayan membuka ruang-ruang interaksi masyarakat untuk menumbuhkan rasa percaya akan kebijakan yang ada di desa maupun transparansi anggaran, terbukti di era digital ini desa Babakan Peuteuy mempunyai website atau media online dimana wadah tersebut bentuk transparansi kebijakan maupun anggaran di desa, tidak hanya di media online, baliho. Yang menunjukkan kemana saja anggaran selama satu periode ada di depan kantor desa (sesuai kebijakan pergub) |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Akan tetapi ada masalah di penyampaian data atau penyampaian informasi yg seakan-akan tidak utuh atau tidak kumplit, dan kurangnya edukasi perangkat desa untuk mengedukasi bahwa wadah untuk informasi ini ada dan bisa di pergunakan untuk sarana. |
|  | 2 | Bagaimana kemudahan akses informasi yang diterima oleh masyarakat?  | Sejauh ini masyarakat mudah sekali mengakses informasi di desa, akan tetapi kesadaran masyarakat yang mungkin belum terbangun dan kurangnya edukasi soal pentingnya informasi untuk melahirkan informasi dampak.                                     |
|  | 3 | Bagaimana kesulitan menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap? | Belum ada mekanisme terkait pengaduan, mungkin langsung ke kepala desa ataupun ke ketua BPD.   |
|  | 4 | Bagaimana arus informasi yang diberikan aparatur kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media massa       | Di desa untuk kolaborasi media atau kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah cukup baik.  |

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
|               |   | dan lembaga non pemerintah?   |   |
|               |   |   |   |
| Partisipasi   | 1 | Apakah forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka?  | Seperti pada umumnya desa, untuk forum partisipasi masyarakat, desa selalu menghadirkan lembaga atau tokoh perwakilan ke forum tersebut, seperti di di MUSDUS (Musyawarah Dusun dan musdes (musyawarah desa). |
|               | 2 | Bagaimana respon aparatur desa ketika masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan?   | Sangat baik, desa selalu terbuka untuk mengambil keputusan.   |
|               |   |   |   |
| Akuntabilitas | 1 | Apakah masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar? | Sebagai masyarakat, kita selalu diberikan kesempatan dalam proses pembuatan keputusan, masyarakat juga ikut andil dalam penilaian atas suatu kebijakan yang di ambil oleh Pemerintahan Desa.                  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | 2 | Apakah masyarakat sudah mendapatkan kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku? | Sudah, dengan salah satu prinsip pemerintahan desa babakan peuteuy yaitu transparan terhadap masyarakatnya. |
|  |   |  |   |
| Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas ( <i>Value For Money</i> ) | 1 | Apakah aparatur desa sudah memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal)?  | Karena masa jabat baru terbilang 2 tahun, mungkin belum maksimal mengingat ada musibah bersama yaitu covid. |
|  | 2 | Apakah keberhasilan organisasi yang sudah dicapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa babakan peuteuy?  | Sudah ada dampak positif seperti kembalinya pengaktifan bumdes dan karta desa, banyak yg telah di lakukan.  |

Identitas Informan:

Nama : Hilmy Agusta  
Jenis Kelamin : Laki-laki/~~Perempuan~~  
Jabatan : Masyarakat Desa Babakan Peuteuy  
Tanggal Wawancara : 29 Agustus 2021  
Usia : 35 Tahun  
Pendidikan : S-1

|              | No | Pertanyaan  | Jawaban   |
|--------------|----|---|---|
| Transparansi | 1  | Bagaimana penyampaian aparatur desa kepada masyarakat terkait informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab? | Menurut saya, penyampaian aparatur desa babakan peuteuy terutama pada informasi masih kurang, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan juga pengembangan media sosialnya masih kurang , dizaman digital ini memaksimalkan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi sangat berguna untuk masyarakat sekitar , dan juga koordinasi kepada rt/rw agar menyeluruh. |
|              | 2  | Bagaimana kemudahan akses informasi yang diterima oleh masyarakat?  | Dengan di sosialisasikan terus menerus melalui media sosial atau melalui tokoh masyarakat setempat, itu akan mempermudah akses informasi dari desa.   |
|              | 3  | Bagaimana kesulitan menyusun mekanisme  | Dengan menyediakan bilik pengaduan melalui media sosial   |

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
|               |   | pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap?  | desa yang dipegang oleh admin yang cukup netral kemudian disampaikan ke pemerintah pusat, dan jika ada uang suap langsung laporkan ke pemerintah pusat agar diusut. |
|               | 4 | Bagaimana arus informasi yang diberikan aparatur kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah? | Dengan pemerintah desa membuat dan mengembangkan media sosial, atau bekerja sama dengan tokoh/organisasi masyarakat setempat untuk sosialisasi.                     |
|               |   |   |   |
| Partisipasi   | 1 | Apakah forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka?                        | Media sosial pemerintah yang adminnya bisa dipastikan bersifat netral dan ada transparansi tiap minggu nya akan partisipasi masyarakat.                             |
|               | 2 | Bagaimana respon aparatur desa ketika masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan?   | Membuka forum secara rutin dengan perwakilan dari masyarakat terkait kebijakan yang akan dibuat, agar bisa mendapat kebijakan yang menguntungkan kedua pihak.       |
|               |   |   |   |
| Akuntabilitas | 1 | Apakah masyarakat terlibat dalam proses   | Masyarakat selalu di libatkan dalam pembuatan keputusan   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   | pembuatan keputusan yang dibuat tertulis?  | yang berdampak langsung pada masyarakat desa babakan peuteuy.  |
|  | 2 | Apakah masyarakat sudah mendapatkan kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku? | Menurut saya sudah cukup efektif namun butuh dikembangkan secara maksimal agar lebih efektif dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat secara nyata. |
|  |   |  |  |
| Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas ( <i>Value For Money</i> ) | 1 | Apakah aparatur desa sudah memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal)?  | Sudah secara infrastruktur seperti jalan dan juga bangunan publik, sudah dirasakan sebagai output dari program desa.                               |
|  | 2 | Apakah keberhasilan organisasi yang sudah dicapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa babakan peuteuy?  | Dengan terbentuknya kembali karang taruna desa yang menaungi karang taruna tiap rw, untuk membantu desa mengembangkan programnya.                  |



Identitas Informan:

Nama : Aria Diman  
 Jenis Kelamin : Laki-laki/~~Perempuan~~  
 Jabatan : Masyarakat Desa Babakan Peuteuy  
 Tanggal Wawancara : 29 Agustus 2021  
 Usia : 26 Tahun  
 Pendidikan : S-1

|              | No | Pertanyaan  | Jawaban  |
|--------------|----|---|--|
| Transparansi | 1  | Bagaimana penyampaian aparatur desa kepada masyarakat terkait informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab? | Menurut saya, penyampaian yang disampaikan aparatur desa bisa dikatakan masih kurang cukup untuk dapat dipahami.<br>Contoh kasusnya, beberapa waktu lalu sama minta data KIP adik saya dibetulkan karena ada kesalahan di nik, saya diminta untuk datang ke Soreang, ke bagian dingsos bertemu dengan bapak siapa lupa. Tapi sampai disana pihak dingsos mengatakan bahwa seharusnya data diinput di desa dan tidak perlu ke dingsos. Alhasil nihil.<br>Menyoal prosedur desa, biaya, dan tanggung jawab lainnya, saya pribadi kurang tahu juga, karena saya kurang aktif juga di desa sinim Tapi baiknya, disosialisasikan, bagian2 di desa |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | dan sebagainya, agar masyarakat bisa tidak kebingungan. Saya org yang selalu bertanya saja mwrasa bingung terlebih orang yang enggan bertanya.   |
|  | 2 | Bagaimana kemudahan akses informasi yang diterima oleh masyarakat?  | Menurut saya masih sulit dijangkau, sebab akses informasi yang disampaikan melalui RT/RW terkadang tidak sampai ke masyarakat. Bahkan warga harus mengunjungi kantor desa demi mendapatkan informasi yang seharusnya didapat sebelum-sebelumnya. Dalam hal ini mungkin komunikasi dari pihak RW/RT tidak tersalurkan dengan baik kepada warga. |
|  | 3 | Bagaimana kesulitan menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap? | Sejauh ini saya belum melakukan pengaduan terkait hal tersebut. Sepengetahuan saya jika melakukan pengaduan langsung kunjungi kantor desa dan sampaikan kepada pihak atasan. Mungkin demikian.   |
|  | 4 | Bagaimana arus informasi yang diberikan aparatur kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media massa       | Arus informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui pejabat tingkat RT/RW kurang tersalurkan dengan baik. Sementara, informasi lebih cepat didapat dari media massa baik   |

|             |   |  |   |
|-------------|---|--|---|
|             |   | dan lembaga non pemerintah?  | itu media sosial resmi atau pun media partner lainnya.<br>Saya sejujurnya lebih sering dapat informais dari media lain daripada dari akun resmi desa.   |
|             |   |  |   |
| Partisipasi | 1 | Apakah forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka? | Kalau ini saya kurang tahu ada atau tidaknya forum apresiasi, forum aspirasi, ataupun forum diskusi. Yang saya dengar biasanya, aspirasi disampaikan dari mulut ke mulut hingga sampai kepada pejabat desa. Mungkin bisa lewat pejabat warga setempat misalnya RT/RW, Namun, jika seandainya akses keterbukaan partisipasi itu jelas dan mudah, banyak warga yang akan memberikan pendapat, aspirasi, hingga masukan bagi pejabat desa. |
|             | 2 | Bagaimana repson aparatur desa ketika masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan?                  | Sejauh pandangan saya sebagai warga pasif, sepertinya pihak pejabat desa terbuka sekali dengan ketwrlibatan masyarakat terhadap pembuatan keputusan. Maksudnya lebih mempersilakan dan tentu menjadi pertimbangan.  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
| Akuntabilitas  | 1 | Apakah masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis?  | Masyarakat ikut andil dalam proses pembuatan keputusan, namun tetap saja keputusan atau kebijakan diputuskan oleh Kepala Desa.   |
|  | 2 | Apakah masyarakat sudah mendapatkan kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku? | Saya kira sudah sesuai dan saya rasa masih ada yang diusahakan. Menurut saya perubahan desa skrg dan dulu juga sudah terlihat, tentu ada perbaikan dan pencapaian visi misinya, meski masih ada yang harus dibenahi.   |
|  |   |  |  |
| Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas ( <i>Value For Money</i> ) | 1 | Apakah aparatur desa sudah memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal)?  | Mungkin sudah cukup baik dalam pengalokasian dana. Sebab, banyak perubahan, misalnya jalan diperbaiki dengan sangat baik.  |
|  | 2 | Apakah keberhasilan organisasi yang sudah dicapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa babakan peuteuy?  | Tentu, dari pertanyaan yang disampaikan kepada saya, saya kira yang jadi problematika di desa adalah pelayanan yang jelas dan alur yang mudah.<br><br>Maksudnya pelayanannya kurang jelas, dan alur atau distribusi komunikasi dari pihak desa hingga ke warga kurang. |

## Lampiran 3

### Surat Permohonan Melakukan Penelitian



Nomor : 149/LIT-SKRIPSI-TA/DEK-FISIP/UNIKOM/VII/2021  
Perihal : Permohonan Untuk Melakukan Survey Penelitian

Kepada Yth.  
Kantor Kesbangpol Kabupaten Bandung,  
Jl. Raya Soreang Cincin No.104, Pamekaran,  
Kec. Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami menerangkan bahwa,  
Nama : Sigit Kurniawan  
NIM : 41717007  
Tingkat : IV (Empat)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Bermaksud akan mengadakan observasi/research/interview pada Kantor Di Desa Babakan Peteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk keperluan pembuatan Skripsi dalam Bidang Ilmu Pemerintahan. Sehubungan dengan hal itu kami mohon dengan sangat, sudilah kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan kepada mahasiswa kami tersebut di atas, dan mengizinkan staf Bapak/Ibu untuk memberikan keterangan serta penjelasa sekitar aspek-aspek yang berkenaan dengan judul :

**"Penerapan Good Governance Di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung" (Pandemi Covid-19)"**

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu tidak berkeberatan untuk memberikan izin serta bantuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian skripsi guna menyelesaikan studinya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 19 Juli 2021




Ditandatangani secara elektronik oleh  
Dekan FISIP Unikom

Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak.CA

Tembusan :  
1. Yth. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
2. Arsip

## Lampiran 4

### Surat Telah Selesai Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN CICALENGKA**  
**DESA BABAKAN PEUTEUY**  
Jln. Desa Babakan Peuteuy No. 08 Boor – Cicalengka 40395

Babakan Peuteuy, 31 Agustus 2021

Nomor : 155/DS-2003/VIII/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Kepala Desa


Kepada Yth  
Ketua  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA (UNIKOM)  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat \_\_\_\_\_

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA (UNIKOM), dengan data sebagai berikut :

| No | Nama            | NIM      | Program Studi     |
|----|-----------------|----------|-------------------|
| 1  | SIGIT KURNIAWAN | 41717007 | Ilmu Pemerintahan |

Menyatakan bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan penelitian Skripsi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

  
Babakan Peuteuy

## Lampiran 5

### Berita Acara Bimbingan Skripsi



#### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

Nama Mahasiswa : Sigit Kurniawan  
 NIM : 41717007  
 Nama Pembimbing : Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si  
 Judul Skripsi : Penerapan Good Governance di Desa Babakan Peuteuey  
 Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

| BIMBINGAN KE | TANGGAL         | MASUKAN                             | PARAF PEMBIMBING |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 1            | 23 Maret 2021   | Konsolidasi Judul usulan Penelitian | Me               |
| 2            | 24 Maret 2021   | Pemaparan Judul Penelitian          | Me               |
| 3            | 3 April 2021    | Bimbingan Bab 1 Pendahuluan         | Me               |
| 4            | 13 April 2021   | Bimbingan revisi Bab 1 Pendahuluan  | Me               |
| 5            | 28 April 2021   | Bimbingan Bab 2                     | Me               |
| 6            | 5 Mei 2021      | Bimbingan Revisi Bab 2              | Me               |
| 7            | 15 Mei 2021     | Bimbingan Bab 2                     | Me               |
| 8            | 18 Mei 2021     | Bimbingan Revisi Bab 2              | Me               |
| 9            | 26 Mei 2021     | Bimbingan Bab 3                     | Me               |
| 10           | 28 Mei 2021     | Bimbingan Revisi Bab 3              | Me               |
| 11           | 29 Mei 2021     | Bimbingan Persiapan Ujian SUP       | Me               |
| 12           | 20 Juni 2021    | Bimbingan Revisi SUP                | Me               |
| 13           | 21 Juni 2021    | Bimbingan Revisi SUP                | Me               |
| 14           | 21 Agustus 2021 | Revisi Bab IV dan Bab V             | Me               |
| 15           | 23 Agustus 2021 | Revisi Bab IV dan Bab V             | Me               |
| 16           | 31 Agustus 2021 | Acc Naskah Skripsi                  | Me               |

Bandung, 31 Agustus 2021

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Nia Kurniawati, S.IP., M.Si.  
 NIP. 4127.35.31.002

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.  
 NIP. 4127 35 31 003

## Lampiran 6

### Dokumentasi dengan Kasi Pemerintahan Desa Babakan Peuteuy





## Lampiran 7

### Dokumentasi dengan Kasi Pemerintahan Babakan Peuteuy



## Lampiran 8

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Sigit Kurniawan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kulon Progo, 17 Agustus 1999
3. Nomor Induk Mahasiswa : 41717007
4. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat : Perumahan Griya Inti Blok C2 No 14 Rt 03  
Rw10 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan  
Cicalengka Kabupaten Bandung
9. Email : Sigitk737@gmail.com
10. NO HP : 088224533085
  - Berat Badan : 55kg
  - Tinggi Badan : 165cm
  - Status Marital : Belum Kawin
11. Orang Tua
  1. Nama Ayah : Sunardi
  2. Pekerjaan : Buruh
  3. Alamat : Perumahan Griya Inti Blok C2 No 14 Rt 03  
Rw10 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan  
Cicalengka Kabupaen Bandung
  4. Nama Ibu : Pariyem
  5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  6. Alamat : Perumahan Griya Inti Blok C2 No 14 Rt 03  
Rw10 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan  
Cicalengka Kabupaen Bandung